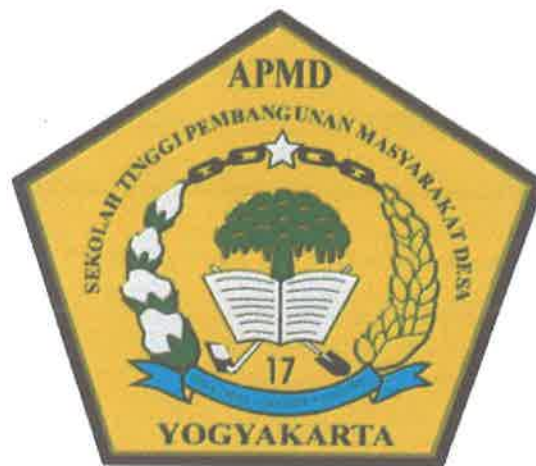


**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa (PADes)**
*(Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1) Pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

MELFIANUS UMBU RETANG KHALI

16520028

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022



**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa (PADes)**

(Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten

Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar

Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1) Pada

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun oleh:

MELFIANUS UMBU RETANG KHALI

16520028






**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Ruang Ujian Skripsi “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Rr.Leslie Retno Angeningsi, Ph.D</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dra. Sri Utami, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melfianus Umbu Retang Kahali

Nim : 16520028

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY”* adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



MELFIANUS UMBU RETANG KHALI

16520028

MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Kristus Yesus” (Filipi 4:6)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“Tidak Masalah Seberapa Lambat Kamu Berjalan Asalkan Kamu

Tidak Berhenti”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala berkat dan karuniaNya yang dilimpahkan bagi saya sehingga peneliti bisa menyelesaikan Program Sarjana (S1), Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bagi kedua orang tua saya Umbu Kalambar Parahi, Rambu Mora Lambu yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa dan semangat tiada henti untuk masa sedepan saya. Karna ini saya persembahkan untukmu meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanaanmu untukku. Terimakasih sudah mendidik dan memberikan inspirasi yang terbaik untuk saya. Tuhan Yesus memberkati.
2. Untuk Kaka dan adik saya Mama Umbu Dion, Kaka Dian, Adik Maksi, karya ini saya persembahkan untuk saudara saya yang selalu mendukung dan mensupport saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk kaka saya Bapa Umbu Joy dan Mama Umbu Joy yang sudah mensupport saya dan membantuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk dosen pembimbing saya ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih,Ph.D. terimakasih sudah membimbing dengan sabar dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan dan ketulusan hati ibu tanpa ibu tidak mungkin saya selesaikan karya ilmiah saya ini. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan ibu. Maaf juga salah kata dan tingkah laku yang mengganggu perasaan ibu. Semoga ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
5. Untuk teman-teman saya Umbu Wanda, Faisal, Jhony, Melki, Flori, Ardi Patong, Sandro dan masih banyak lagi yang telah memberikan semangat dan motivasi selama dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dan informan yang telah memberikan keterangan pada saat penelitian khususnya Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan Anugerahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, saya sadari kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa melalui keluarga, sahabat, orang-orang tersayang yang selalu dengan ikhlas menemani selama proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Setulus hati yang besar penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis dalam mengkaji masalah ini, namun demikian, skripsi ini hasil kerja upaya yang maksimal, tidak sedikit hambatan, rintangan, cobaan, kesulitan, yang ditemui penulis. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih dengan masukan dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat memperbaiki tulisan ini menjadi lebih baik lagi. Namun patut di syukuri karena banyak pengalaman yang dapat diambil dalam penulisan skripsi.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsi, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah dengan tulus membantu membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat melaksanakan ujian

sebagai akhir dari masa kuliah untuk mendekati kesempurnaan penulisan skripsi.

4. Dosen penguji I Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si
5. Dosen penguji II Dra. Sri Utami, M.Si
6. Kepada Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dan masyarakat yang telah dengan tulus menerima peneliti dalam membantu proses penelitian.
7. Kepada Almamater Tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, terimakasih untuk ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan atau didapatkan selama proses perkuliahan.

Semoga kebaikan diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini senantiasa mendapat karunia dan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Yogyakarta, 06 Juli 2022

Penulis

MELFIANUS UMBU RETANG KAHALI

16520028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Literatur Review	6
F. Kerangka Teori	10
G. Ruang Lingkup.....	23
H. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Unit Analisis	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Analisis Data.....	28

BAB II PROFIL DESA NGLANGGERAN & BUMDes TUNAS MANDIRI	30
A. Profil Desa	30
B. Kondisi Geografis	32
C. Kondisi Demografis	34
D. Sosial Budaya	38
E. Sarana dan Prasarana	40
F. Keadaan Ekonomi	41
G. Kondisi Lembaga Pemerintahan	45
H. Profil Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri	52
BAB III Analisis Pengelolaan BUMDes Untuk PADes	60
A. Situasi Pandemi Covid-19 di Kalurahan Nglanggeran	60
B. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa & BUMDes ..	61
C. Pengelolaan yang lakukan oleh BUMDES	66
D. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa & BUMDes..	70
E. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa & BUMDes..	73
F. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa & BUMDes	77
BAB IV KESIMPULAN Dan SARAN	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Intisari

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. BUM Desa adalah salah satu inovasi yang muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUM Desa pada dasarnya bertujuan mengelola potensi-potensi yang di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian desa dan juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Dalam pengelolaan masih banyak BUMDesa yang belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola BUM Desa. Kalurahan Nglanggeran merupakan kalurahan yang memiliki badan usaha milik desa. Dengan demikian peneliti merumuskan “bagaimana pengelolaan bumdes untuk meningkatkan PADes”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif naratif maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa pengelolaan potensi desa, dalam hal ini Pengelolaan wisata, toko grosir, usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED SP) dan pengelolaan sampah yang dikelola oleh BUM Desa “Tunas Mandiri” di Kalurahan Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telah terlaksana dengan baik hingga saat ini dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan oleh pemerintah desa Kalurahan Nglanggeran dan masyarakat desa maupun BUM Desa.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan BUM Desa untuk meningkatkan PADes terkait pengelolaan potensi wisata dan potensi lainnya yang ada di desa yang dikelola oleh BUM Desa sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan masyarakat desa, pemerintah desa maupun BUM Desa itu sendiri. Bahwa dalam pengelolaan yang dilakukan selama ini terkait potensi-potensi yang dikelola oleh BUM Desa untuk meningkatkan PADes sudah berjalan maksimal sampai saat ini. Dalam hal ini dapat membangun kerja sama yang baik antara Pemerintah desa, BUM Desa dan masyarakat desa, sehingga terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis. Dan juga ini menjadi bukti bahwa BUM Desa sangat melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa itu sendiri.

Kata Kunci: Pengelolaan, BUM Desa, PADes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penetapan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara *azas rekognisi dan subsidiaritas* utama yang menjadi ruh UU ini.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 3 pengaturan desa beraskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Dengan hadirnya

uu no. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan, desa mampu secara mandiri mensejahterakan masyarakatnya tanpa ketergantungan pada pemerintah daerah, pemerintah desa harus berupaya untuk memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengola potensi yang terdapat dalam desa tersebut. Potensi tersebut bisa dilihat dari sumber daya manusia itu sendiri maupun dari sumber daya alam. Kedua sumber daya harus mampu dimaksimalkan untuk mengelola potensi yang ada di desa. Jika hanya potensi sumber daya alam yang terdapat dalam desa tanpa diimbangi potensi sumber daya manusianya maka tentunya menjadi suatu masalah. Maka dari itu diperlukan pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia (Notoatmodjo, 1992). Sejalan dengan pendapat diatas, maka perlu adanya pengelolaan potensi yang ada di desa. Pengelolaan potensi desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Artinya, dengan meningkatnya pendapatan asli desa, maka dana yang berada di desa menjadi modal untuk membiayai pembangunan atau kesejahteraan masyarakat bagi desa tersebut.

Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Ini merupakan sumber pendapatan desa untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga desa mampun melaksanakan kewenngan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat maka perlu didukung dengan sumber pembiyaan (pendapatan). Jika pendapatan asli

desa bisa dikembangkan maka desa akan mendapatkan dana pengolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di desa.

Berkaitan dengan sumber pendapatan desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat (2) bersumber dari: a. pendapatan asli desa terdiri hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasla tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, alokasi APBN, alokasi dana desa, bantuan keuangan APBD provinsi, dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa banyak potensi dari sumber pendapatan desa.

Berdirinya badan usaha milik desa (BUM Desa) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 87 Ayat (1) disebut bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pendirian badan usaha milik desa disertai

dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten/kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat badan usaha milik desa (BUM Desa) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan.

Salah satu usaha desa untuk memperoleh dana sendiri adalah melalui badan usaha milik desa (BUM Desa). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan badan usaha milik desa (BUM Desa) memiliki maksud untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa.

Dalam proses pengentasan kemiskinan dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan potensi alam yang ada didesa diperlukan peran aktif dari pemerintah desa maupun masyarakat desa. Desa Nglanggeran adalah desa yang terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat. BUMDes Desa Nglanggeran secara resmi telah berdiri pada tahun 2011, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini didirikan berdasarkan Peraturan

Desa Nglanggeran Nomor 20 Tahun 2016 dengan visi “Bersinergi Mewujudkan Desa Mandiri”. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini membawahi empat unit usaha, yaitu usaha pariwisata, usaha goser bahan pokok, pengelolaan sampah dan usaha UED SP.

Dari keempat unit usaha bumdes tersebut penghasilan sebelum pandemi covid-19 pendapatan bumdes sebesar Rp 75.000.000,00 Setelah pandemi covid-19 melanda maka pendapatan bumdes menurun sebesar Rp 50.000.000,00 ditahun 2021 yang disumbangkan kekalurahan sebagai PAD sebesar Rp 12.000.000,00 Permasalahan jumlah penurunan pendapatan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengelolaan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Berkaitan dengan masalah yang ada tersebut maka penelitian ini mengarah ke Governance, hal ini dapat dilihat dari pengertian governance sendiri yang merupakan serangkaian proses pembuatan keputusan dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Governance juga membahas mengenai tatakelola atau proses pengelolaan sumberdaya dalam suatu organisasi untuk menciptakan suatu keadaan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaiman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Des di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan maafaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya penelitian yang fokus kajiannya pada pengelolaan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Literatur Review

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mario Wowor, Frans Singkoh, Welly Waworundeng, yang berjudul. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso*. Hasil penelitian tersebut terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Tahun 2019 dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat.

Pengelolaan BUM Desa dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdi Harobu Ubi Laru, Agung Suprojo yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Tahun 2019 dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlekung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi dan teknik analisis interaktif Miles and Huberman.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa terdapat lima peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlekung. Dalam menjalankan peranannya tersebut terdapat Faktor pendukung yaitu tersedianya sarana prasana, adanya kebijakan khusus mengenai pengurus, adanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian piutang, dan minimnya kemampuan pengurus dalam hal pembuatan laporan keuangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2016 Pembentukan BUM Desa merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUM Desa dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUM Desa yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUM Desa di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUM Desa dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUM Desa di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUM Desa dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.
4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afifa Rachmanda Filya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Desa yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun

sering ditemukan tujuan tersebut belum terpenuhi karena antara pendapatan dan kontribusi yang diberikan tidak signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi pengelolaan BUMDesa dalam meningkatkan PADes. BUMDesa Guyub Reksa Dana milik Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro merupakan salah satu BUMDesa yang perlu dilakukan optimalisasi karena setelah mengalami mati suri dan kembali beroperasi selama 2 tahun terakhir kontribusi yang diberikan ke dalam PADes hanya 10 juta per tahun. Angka tersebut tidak mencapai 10% dari total Pendapatan Asli Desa Sukorejo. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pengelolaan BUMDesa dalam meningkatkan PADes di Desa Sukorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDesa sudah berjalan baik namun masih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi. Saran yang diberikan peneliti yaitu: (1) Dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap dimensi dan indikator yang belum terpenuhi, (2) Menarik minat masyarakat terhadap BUMDesa dengan membuat acara dan (3) Pemerintah Desa melakukan pendampingan intensif terhadap BUMDes agar memacu pendapatan.

5. Eka Cahyani, Ahmad Guspul, Ratna Wijayanti Analisa Pengaruh Bumdesa Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdesa Silatri Indah Desa Beran Dan

Bumdes Srikandi Desa Ropoh), Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam menopang kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat pada penelitian ini dilakukan di Desa Beran (BUMDesa Silatri Indah) dan Desa Ropoh (BUMDesa Srikandi). Pelaku penelitian ini terdapat tiga sudut pandang yaitu pemerintah, pengelola BUMDesa dan masyarakat Kepil. Aktivitas terakhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah melihat keberadaan BUMDesa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kepil. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan metode triangulasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini adalah keberadaan BUMDesa mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Kepil umumnya, Desa Beran dan Desa Ropoh khususnya, dari segi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat meningkat. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan program dan kinerja BUMDesa yang membantu meningkatkan pembangunan Desa Beran dan Ropoh menjadi lebih baik.

F. Kerangka konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata management, yang berarti mengatur, mengelola, menangani, serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini sangat penting dilakukan untuk menjalankan roda suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (suhelayanti et al, 2020).

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim dan Salim, 2002:534).

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu mengerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Adisasmita, (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut (Handoko: 2015:8) pengelolaan atau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Manajemen atau pengelolaan menurut Hasiuan dalam Torang (2013: 165) adalah ilmu atau seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang tertentu secara efektif dan efisien.

Pengelolaan (Manajemen) menurut Mary Parker Follet (1997) dalam bukunya Ernie Tisnawati Sule & Kurmiawan Saefullah (2012) manajemen adalah seni dalam meyelesaikan sesuatu melalui orang lain.

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemanfaatan, pemeliharaan, pengaturan secara sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya (Depdikbud, 1995/1996: 1-2).

a. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk mengaja keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tetap, Afifiddin (2010: 3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab

- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
 - d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
 - e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
 - f. Menentukan ukuran untuk menilai
 - g. Mengadakan pertemuan
 - h. Pelaksanaan
 - i. Mengadakan penilaian
 - j. Mengadakan review secara berkala
 - k. Pelaksana tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang
- b. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Sedangkan menurut John D. Millet dalam Burhanuddin (1994:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli: Henry Fayol mengemukakan ada lima fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pemberian Perintah), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Controlling* (Pengawasan).

Menurut Terry (2006: 342) menuliskan 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.

Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *Actuating* diperhalus menjadi *Motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Dari defenisi dan konsep pengelolaan diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indicator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga maupun organisasia atau perusahaan. Bagi suatu organisasi pengelolaan menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan sebagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya.

c. Pengelolaan Yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organasasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas,

dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negative terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi berkerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Terry (2006: 342) menjelaskan pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menguhungkan fakta satu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar berkerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
 4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.
- Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk (2015: 31) adalah:
 - a. Mengurang/mengimbangi ketidak pastian perubahan diwaktu yang akan datang.
 - b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
 - c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
 - d. Memudahkan pengawasan
 - Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk (2015: 31) adalah:
 - a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
 - b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan

- c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambing htiamkan orang lain.
- d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja
- Tujuan pergerakan menurut terry (2006:364) adalah:
 - a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
 - b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf
 - c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai perkerjaan
 - d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
 - e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis
- Tujuan pengawasan menurut sukarno (1982:165) adalah:
 - a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
 - b. Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah diperintahkan
 - c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam perkerjaan atau bekerja
 - d. Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan

2. Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)

a. Pengertian BUM Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lahirnya bumdesa diharapkan dapat memberikan alternative bagi desa dalam mengembangkan aset desa, dan potensi desa yang memiliki peluang pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh bumdesa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bumdes adalah badan usaha milik desa yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang digunakan untuk mengelola aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

b. Maksud dan tujuan pembentukan BUM Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Miliki Desa, pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

BUMDesa dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan ekonomi Desa;
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan BUM Desa. Pasal 3 penulis dapat menyimpulkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya BUM Desa yang mampu mengembangkan setiap potensi desa baik asset desa, jasa, atau unti usaha lainnya.

3. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset desa, gotong royong, swadaya dan partisipasi, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang tertuang dalam BAB VIII, tentang keuangan dan aset desa, dan sumber pendapatan asli desa terdiri dari :

1. Hasil usaha desa

Hasil usaha desa merupakan upaya yang di lakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi seperti usaha jasa keuangan, jasa transportasi, listrik desa, perdagangan. Hasil bumi seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain. Usaha ini yang berbentuk badan usaha dan juga hanya sebatas mengelola potensi kekayaan desa.

2. Hasil asset desa

Hasil asset desa adalah seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau dimiliki atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan desa merupakan potensi yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan desa, kekayaan desa di antaranya seperti: tanah kas desa, pasar desa, badan usaha milik desa, wisata desa dan lain-lain. Pemanfaatan kekayaan desa misalnya pemerintah desa menyewakan tanah kas desa untuk di pergunakan sebagai lahan usaha.

3. Hasil swadaya dan partisipasi

Swadaya masyarakat adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ihtiar diarah pemenuhan kebutuhan jangkat pendek maupun jangka panjang yang dirasakan masyarakat itu. Baik swadaya maupun partisipasi keduanya merupakan modal sosial yang masih berkembang di masyarakat desa dan merupakan pendapatan desa yang di dapatkan dari sumbangan masyarakat desa, penetapan bentuk jenis swadaya di tentukan dengan kebutuhan, kondisi dan budaya masyarakat. Misalnya dalam pembangunan jalan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk materi sehingga dapat menyukseskan pembangunan yang ada di desa.

4. Hasil gotong royong

Gotong royong merupakan satu di antara ciri khas dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara garis besar, gotong royong tertuang dalam Pancasila yaitu sila ketiga “Persatuan Indonesia”

Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga des dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersam, baik materi maupun spiritual, seperti halnya swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong juga merupakan modal sosial yang masih bertahan di masyarakat desa dan potensi yang biasanya mendatangkan pendapatan bagi desa.

5. Pendapatan asli desa lain

Pendapatan asli desa lain adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam peraturan desa dan pungutan ini belum di pungut oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. Pungutan desa berupa pungutan yang berasal dari pasar desa, ongkos cetak surat keterangan dan administrasi atau bisa juga pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak atas tanah bangunan sesuai atauran yang berlaku.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Pengelolaan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di desa nglanggeran kabupaten gunung kidul dengan menggunakan indicator sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*) Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2. Pengelolaan (*management*) Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Pelaksanaan (*Actuating*) Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dan Pihak BUM Desa
4. Pengontrolan (*Controlling*) Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dan BUM Desa

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif naratif.

Pengertian kualitatif menurut Sutopo dan Arief (2010) menyimpulkan beberapa pendapat tentang pengertian kualitatif yaitu: 1) mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual, maupun kelompok. 2) kegiatan terencana untuk menangkap praktek penafsiran responden atau informan terhadap dunianya (etnik atau verstehen) yang selalu menjemuk, berbeda dan dinamis, 3) bersifat menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan (to describe, explore and explain).

Menurut Webster dan Metrova, narasi (narrative) adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita (narasi) yang ia dengarkan

ataupun tuturkan didalam aktivitasnya sehari-hari. Menggambarkan atau memaparkan dan menganalisis data.

Bentuk penelitian naratif antara lain:

1. Menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu (slowly over time), ketika menjelaskan subyek studi mengenai budaya saling-berbagi di dalam kelompok (a culture-sharing group), narasi kehidupan seseorang (the narrative of the life of an individual) atau evolusi sebuah program atau sebuah organisasi (evolution of a program or an organization).
2. Menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti pendeskripsian berbagai kejadian, berdasarkan tema-tema atau persepektif tertentu. Gaya naratif, dari studi kualitatif bisa juga mengerangkakan sosial tipikal keseharian hidup seseorang (a typical day in the life) dari sosok individu atau kelompok.
3. Analisis naratif
Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita.

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan

menetapkan kriteria responden tersebut, peneliti dengan sendiri akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti menemukan informan awal yakni orang yang pertama memberikan informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktifitas pengumpulan data.

- a. Objek penelitian yaitu: pengelolaan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan asil desa (PADes) di Desa Nglanggeran
- b. Subjek penelitian yaitu: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Direktur Bumdes, BPD, pengurus bumdes, warga masyarakat

Tabel 1.1 Deskripsi Informan Menurut Jabatan

No	Nama	L/P	Tingkat Pendidikan	Umur	Jabatan
1	Widada	L	SLTA	62	Kepala Desa
2	Rusmiyati	P	D3	42	Sekrekaris
3	Triyanto	L	D3	41	Kasi kesejahteraan
4	Suprawati	P	SMA	52	Kasi Perencanaan
5	Ahmad Nasrudin	L	S1	55	Direktur BUM Desa
6	Heru Purwanto	L	D3	37	Bendahara BUM Desa
7	Supardi	L	SLTA	47	Pengurus BUM Desa
8	Surgiyanti	P	SLTA	42	Pengurus BUM Desa
9	Ponijo	L	SLTA	55	Ketua BPD
10	Adam	L	SMA	31	Masyarakat
11	Wanti	P	SMK	44	Masyarakat

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas peneliti dapat menemui orang-orang yang dinilai mempunyai kepentingan dalam pengelolaan badan usaha miliki desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Para narasumber

terdiri dari kepala desa, direktur bumdes, perangkat desa, pengurus bumdes, dan masyarakat setempat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian naratif adalah bentuk khas dari penelitian kualitatif, biasanya berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang disampaikan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita, dimana pelaporan pengalaman individu, dan membahas arti pengalaman itu bagi individu. Cresswell (2012).

Menurut Suharsimi Arikunto (2000: 134), teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

a. Observasi

Menurut Bungin yang dimaksud dengan observasi adalah metode pengumpulan data yang melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan (Bungin, 2001:21).

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada saat narasumber tidak ada aktivitas. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan mengenai pengelolaan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Nglanggeran.

b. Wawancara Mendalam

Dalam bentuk wawancara mendalam, wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal,

dan dapat dilakukan berulang pada informan yang sama: Dalam hal ini, narasumber menceritakan seluruh kegiatannya dan peneliti membuat garis besar pokok-pokok yang ditanyakan. Pelaksanaan wawancara dan urutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan narasumber. Dalam wawancara peneliti in hanya sebatas permasalahan dalam penelitian sehingga informasi dan data-data yang didapat semakin terperinci dan mendalam Mengumpulkan sumber data primer melalui wawancara mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut diperoleh dari buku catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Nawawi, 2001:65). Data tersebut dapat diperoleh dari buku, catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan penelitian ini yang penulis lakukan adalah mencatat data-data skunder dan meminta file dokumen yang dibutuhkan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Nglanggeran. Data-data yang diambil tentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan obyektif.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk

dipahami dan diimplementasikan. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus sehingga datanya sudah jenuh (miles dan huberman, 2009:41) dalam teknik ini ketiga komponen utama yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan seefisien mungkin atau membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

b. Data display (penyajian data)

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data yang telah di pilih dan dikelompokkan secara sistematis dalam bentuk uraian sebagai sebuah laporan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengkonstruksikan menginterpretasikan dan menyimpulkan data yang telah dipilih tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Data yang telah diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN NGLANGGERAN & PROFIL BUM DESA TUNAS MANDIRI

A. Profil Desa

Berdirinya Kalurahan Nglanggeran berawal ketika masa keturunan Ronggowarsito sekitar abad ke 17 dimana kala itu Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Banyak terjadi perang di daerah untuk membebaskan diri dari tekanan penjajahan Belanda. Politik Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa juga sampai hingga ke kerajaan Mataram. Berbagai macam cara dilakukan sehingga terjadi suatu diplomasi yang tertulis dalam perjanjian Gianti. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2, yaitu Kasunan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada masa itu Manguntirto yang merupakan anak dari Ronggowarsito melakukan perlawanan terhadap Belanda. Manguntirto juga memiliki saudara bernama sojoyo yang menjadi Bupati Gantiwarna Klaten. Pada saat melawan Belanda, Manguntirto menggunakan strategi topeng atau cadar sehingga tidak dikenali oleh Belanda pada saat tiap kali membunuh pasukan – pasukan penjajah. Setiap kali habis membunuh tentara Belanda Manguntirto lari ke goa atau bebatuan besar yang jauh dari lokasi dia membunuh tentara Belanda. Manguntirto selalu lolos dari Belanda karena persembunyian beliau tidak pernah ditemukan oleh Belanda. Hingga suatu hari Manguntirto merasa sudah cukup jauh bersembunyi dan tempat persembunyian Manguntirto ini akhirnya dijadikan perkampungan yang diberi nama “Pelanggeran”. Karena lokasi yang dijadikan perkampungan tersebut banyak orang yang datang dan menetap, Hal

ini diketahui oleh pihak keraton Ngayogyakarta, sehingga diangkatlah Manguntirto menjadi bekel. Seiring berjalan waktu Manguntirto tertarik kepada seorang gadis dan gadis tersebut dijadikannya seorang istri. pernikahannya tersebut dikaruniai 1 orang anak laki – laki yang bernama Sutodipo dan 2 orang anak perempuan. Menurut sumber sejarah, Manguntirto dan sang istri menetap di daerah yang berbeda. Manguntirto dan anak laki-lakinya tinggal di Planggeran dan istrinya menetap di daerah Nglegi bersama 2 orang anak perempuannya. Saat dewasa anak dari Manguntirto yakni Sutodipo memiliki kelebihan sehingga ia menjadi kepala desa Planggeran yang sangat disegani. Pada masa pemerintahan Sutodipo nama desa Planggeran diubah menjadi desa Nglanggeran. Maka peneliti dapat mengetahui sejarah perjalanan desa dari awal berdirinya sampai dengan keadaan sekarang ini sehingga dapat memahami keberadaan desa baik dari pemerintahan maupun secara ekonomi dalam kaitannya dengan peneliti tentang penganggaran desa sampai dengan munculnya BUM Desa, karena desa Nglanggeran memiliki segudang potensi maka pemerintah desa dan masyarakat bentuk sebuah BUM Desa guna mengelolah potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa PAD dan demi kesejahteraan masyarakat Nglanggeran. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kepemimpinan Desa Nglanggeran sudah beberapa kali berganti pemimpin.

Pendiri atau penemu Desa Nglanggeran ialah Manguntirto pemimpin selanjutnya:

1. Sutodipo
2. Ranurejo

3. Harjo Sentono
4. Harjo Suwito
5. Hartono (Tahun 19xx sampai dengan tahun 2004)
6. Senen (Tahun 2004 sampai dengan tahun 2014)
7. Surimin, Spd (Penjabat Kepala Desa tahun 2014 sampai dengan 2015)
8. Senen (Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021)
9. Widada (2021 sampai dengan sekarang)

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Nglanggeran merupakan Kalurahan yang secara administratif terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Kawasan gunung api purba memiliki luas 48 ha. Sedangkan wilayah Kalurahan Nglanggeran memiliki luas 762,0990 ha. Wilayah Kalurahan Nglanggeran memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Ngoro-Oro
2. Sebelah Timur : Desa Nglegi
3. Sebelah Selatan : Desa Putat
4. Sebelah Barat : Desa Salam

Jarak Kalurahan Nglanggeran dari Ibukota Kecamatan 4 km, dari Ibukota Kabupaten jarak 22 km dan sedangkan dari Ibukota Propinsi berjarak 25 km. Kalurahan Nglanggeran terdiri dari 5 dusun/pedukuhan yaitu Pedukuhan Karang Sari, Pedukuhan Doga, Pedukuhan Nglanggeran Wetan, Pedukuhan Nglanggeran Kulon dan Pedukuhan Gunungbutak. Pusat pemerintahan desa terletak di Pedukuhan Doga.

Luas wilayah Kalurahan Nglanggeran 762,0990 ha, yang terdiri dari wilayah untuk lahan sawah/pertanian, perkebunan, lading/tegalan, permukiman dan lain-lain. Dari luaswilayah yang masing-masing tersebut, setiap pedukuhan yang tersebar mempunyai karakteristik tersendiri yang membawa dampak baik bagi masyarakat Kalurahan Nglanggeran demi meningkatkan dan memberdayakan berbagai hal positif tersebut untuk menjadi sumber daya pangan serta mata pencaharian bagi masyarakat dengan berbagai bentuk jenis pekerjaan serta aktivitas wilayah masing-masing.

a. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan

Luas wliayah Kalurahan Nglanggeran 762,0990 ha, yang terdiri dari lahan tanah sawah, lahan tanah kering, lahan tanah basah, lahan tanah perkebunan, fasilitas umum, lahan tanah hutan. Ada pun perinciannya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1 Penggunaan lahan/tanah Satuan Ha (Hektar)

No	Tanah Sawah	Ha
1	Tanah sawah	85,38
2	Tanah kering	271,04
3	Tanah perkebunan	110,11
4	Tanah fasilitas umum	28,02
5	Tanah hutan	268,25

Sumber Data: Dari Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021-2022

Dari tabel 2.1 diatas dapat di ketahui bahwa Kalurahan Nglanggeran memiliki lahan tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, lahan fasilitas umum,dan tanah hutan yang mana keseluruhan cukup luas. Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya banyak lahan tersebut maka Kalurahan Nglanggeran memiliki banyak potensi sumber daya alam, masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan

atau di kelolah oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat.

b. Kondisi Topografi

Kalurahan Nglanggeran berada di dataran tinggi atau pegunungan yang terletak di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, terletak pada ketinggian 200.700,00 mdl dari permukaan air laut. Kalurahan Nglanggeran berada di kawan hutan 268,25 Ha, sedangkan kawasan wisata 81,58 Ha. Kalurahan Nglanggeran juga daerah rawan gempa bumi. Sedangkan iklim di Kalurahan Nglanggeran adalah dengan curah hujan 100,00 mm, suhu udara rata-rata harian 30,00 oC jumlah curah hujan perbulan 7,00 mm.

C. Kondisi Demografis

Kependudukan merupakan dinamika kependudukan manusia di suatu tempat. Penduduk Kalurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk mayoritas di terdiri berbagai jenis penduduk namu, terdapat juga beberapa masyarakat pendatang yang biasanya ikut suami yang merupakan penduduk asli Kalurahan Nglanggeran. Selain itu terdapat juga penduduk asli yang merantau ke daerah lain. Jumlah penduduk Kalurahan Nglanggeran terdiri dari 837 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 1328 laki-laki dan 1336 perempuan, total jumlah penduduk Nglanggeran 2664 jiwa sedangkan kepadatan penduduk 349,24 per KM.

Tabel 2.2 Jumlah Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-Laki	Persentase (%)	Perempuan	Persentase (%)	Jumlah
1	0-12 bulan	18	1,36	19	1,42	37
2	1 tahun	21	1,58	18	1,35	39
3	2	14	1,05	14	1,05	28
4	3	14	1,05	20	1,50	34
5	4	10	0,75	17	1,27	27
6	5	19	1,43	19	1,42	38
7	6	18	1,36	20	1,50	38
8	7	12	0,90	14	1,05	26
9	8	21	1,58	19	1,42	40
10	9	14	1,05	23	1,72	37
11	10	19	1,43	20	1,50	39
12	11	23	1,73	23	1,72	46
13	12	18	1,36	21	1,57	39
14	13	21	1,58	10	0,75	31
15	14	15	1,13	14	1,05	29
16	15	26	1,96	15	1,12	41
17	16	20	1,51	17	1,27	37
18	17	22	1,66	14	1,05	36
19	18	18	1,36	21	1,57	39
20	19	20	1,51	15	1,12	35
21	20	20	1,51	13	0,97	33
22	21	24	1,81	14	1,05	38
23	22	18	1,36	16	1,20	34
24	23	23	1,73	17	1,27	40
25	24	20	1,51	24	1,80	44
26	25	14	1,05	12	0,90	26
27	26	20	1,51	17	1,27	37
28	27	28	2,11	28	2,10	56
29	28	21	1,51	21	1,57	42
30	29	15	1,13	22	1,65	37
31	30	17	1,28	24	1,80	41
32	31	10	0,75	12	0,90	22
33	32	16	1,20	12	0,90	28
34	33	17	1,28	15	1,12	32
35	34	13	0,98	19	1,42	32
36	35	20	1,51	19	1,42	39
37	36	15	1,13	16	1,20	31
38	37	28	2,11	15	1,12	43

39	38	18	1,36	20	1,50	38
40	39	17	1,28	19	1,42	36
41	40	24	1,81	21	1,57	45
42	41	16	1,20	20	1,50	36
43	42	23	1,73	13	0,97	36
44	43	21	1,58	15	1,12	36
45	44	24	1,81	26	1,95	50
46	45	28	2,11	23	1,72	51
47	46	15	1,13	22	1,65	37
48	47	11	0,83	14	1,05	25
49	48	19	1,43	22	1,65	41
50	49	25	1,88	26	1,95	51
51	50	19	1,43	19	1,42	38
52	51	17	1,28	25	1,87	42
53	52	17	1,28	16	1,2	35
54	53	21	1,58	22	1,65	43
55	54	16	1,20	19	1,42	35
56	55	24	1,81	18	1,36	42
57	56	18	1,36	12	0,90	30
58	57	11	0,83	12	0,90	23
59	58	19	1,43	18	1,36	37
60	59	12	0,90	13	0,97	25
61	60	19	1,43	21	1,57	40
62	61	12	0,90	13	0,97	25
63	62	17	1,28	12	0,90	29
64	63	13	0,98	15	1,12	28
65	64	9	0,68	15	1,12	24
66	65	8	0,60	14	1,05	22
67	66	10	0,75	11	0,82	21
68	67	15	1,13	9	0,67	24
69	68	10	0,75	7	0,52	17
70	69	10	0,75	8	0,60	18
71	70	7	0,53	22	1,65	29
72	71	4	0,30	4	0,30	8
73	72	8	0,60	4	0,30	12
74	73	6	0,45	9	0,67	15
75	74	4	0,30	6	0,45	10
76	75	4	0,30	9	0,67	13
77	75 keatas	55	4,14	75	5,61	130
Total		1.328	100	1.336	100	2.664

(Sumber Data: Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021)

Dari tabel 2.2 diatas dapat di ketahui bahwa kisaran usia 75 tahun keatas laki-laki yakni sebesar (4,14%) sedangkan perempuan yakni sebesar (5,61%), selanjutnya usia antara 0-12 bulan laki-laki (1,36%) sedangkan perempuan (1,42%). Peneliti melihat bahwa jumlah perempuan dan laki-laki pada tabel tersebut tidak sama, yang mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Bahkan dilihat dari segi usia jumlah usia yang tidak produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia produktif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan melihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia di Kalurahan Nglanggeran dapat mempengaruhi efektivitas produktifitas ekonomi di kalurahan tersebut.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)			
		Laki-Laki	%	Perempuan	%
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	64	7,00	63	6,96
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	47	5,14	56	6,18
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	0,10	1	0,11
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	229	25,05	196	21,65
5.	Usai 18-56 tahun tidak perna sekolah	2	0,21	2	0,22
6.	Usai 18-56 tahun perna SD tetapi tidak tamat	7	0,76	2	0,22
7.	Usai 12-56 tahun tidak tamat SLTP	2	0,21	0	0
8.	Tamat SMP/ sederajat	268	29,32	319	35,24
9.	Tamat SMA/ sederajat	267	29,21	232	25,63
10.	Tamat D-1/ sederajat	0	0	1	0,11
11.	Tamat D-3/ sederajat	7	0,76	9	0,99
12.	Tamat S-1/ sederajat	17	1,85	24	2,65
13.	Tamat SLB A	2	0,21	0	0
14.	Tamat SLB B	1	0,10	0	0
	Jumlah	914	100	905	100

Sumber Data : Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021

Dari tabel 2.3 diatas, berdasarkan hasil analisis menurut presentasen, untuk klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan di Kalurahan Nglanggeran maka untuk tamat SMP perempuan sebesar (35,24%) dibandingkan laki-laki sebesar (29,32%), sedangkan tamat SMA lai-laki lebih banyak (29,21%) dibandingkan perempuan (25,63%) kemudian tamatan S1 perempuan (2,65%) dibandingkan laki-laki (1,85%). Dapat dilihat bahwa anak usia sekolah di Kalurahan Nglanggeran cukup tinggi. Akan tetapi, tingkat pendidikan tamat sekolah tertinggi berada pada anak tamat SD kemudian disusul pada anak tamat SMA dan anak tamat SMP. Berdasarkan data diatas, terdapat masyarakat yang menempuh pendidikan sampai Diploma 1, Diploma 3, Strata 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penduduk Kalurahan Nglanggeran sangat sadar akan pendidikan karena dengan adanya sumber daya manusia yang baik dapat menciptakan lapangan kerja yang memadai

D. Sosial Budaya

Penduduk Kalurahan Nglanggeran, Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul memiliki latar belakang Agama, Suku, Budaya dan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk di kalurahan tersebut adalah sebagai pemeluk Agama Islam. Di kalurahan Nglanggeran sendiri terdapat beberapa etnis yaitu diantaranya Etnis Minang, Etnis Betawi, Etnis Sunda, Etnis Jawa, dan Etnis Dayak Sum, yang Etnis Jawa yang masih menjadi mayoritasnya.

Tabel 2.4 Data Penduduk Menurut Keberagaman Agama

No	Pemeluk Agama	Laki-laki	%	Perempuan	%
1.	Islam	1298	97,7	1312	98,2
3.	Kristen Protestan	6	0,5	3	0,2
4	Katholik	24	1,8	21	1,2
Jumlah		1328	100	1336	100

Sumber : profil kalurahan Nglanggeran, 2021

Dari tabel 2.4 diatas dapat dilihat, bahwa Kalurahan Nglanggeran memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kalurahan Nglanggeran berdasarkan jenis kelamin. Penduduk perempuan lebih banyak beragama Islama (98,2%) dibandingkan laki-laki (97,7%), sedangkan penduduk beragama Kristen Protestan lebih banyak laki-laki (0,5%) dibandingkan penduduk perempuan (0,2%). Demikian juga dengan penduduk beragama Katholik, laki-laki lebih banyak (1,8%) dibandingkan dengan perempuan (1,6%). Penduduk Kalurahan Nglanggeran dilihat dari data diatas maka mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehidupan beragama di Kalurahan Nglanggeran hanya ada tiga agama yang dipeluk oleh masyarakat yaitu: Islam, Kristen, Khatolik, meski begitu tidak ada diskriminasi antar umat beragama.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Keberagaman Etnis

No	Etnis	Laki-laki	%	Perempuan	%
1	Minang	1	0,75	3	0,2
2	Betawi	1	0,75	2	0,14
3	Sunda	3	0,2	0	0
4	Jawa	1323	99,6	1330	99,5
	Dayak Sumatra	0	0	1	0,75
	Jumlah	1328	100	1336	100

(sumber data: profil kalurahan nglanggeran, 2021)

Dari tabel 2.5 diatas dapat dilihat, bahwa penduduk Kalurahan Nglanggeran mayoritas penduduknya beretnis jawa, penduduk laki-laki beretnis jawa (99,6%) dibandingkan perempuan (99,5%), sedangkan penduduk

perempuan etnis minang (0,2%) dibandingkan laki-laki (0,75%) dan penduduk perempuan etnis betawi (0,14%) dibandingkan laki-laki (0,75%), penduduk laki-laki etnis sunda (0,2%) sedangkan penduduk perempuan etnis dayak sumatra (0,75%). Meskipun demikian perbedaan suku masyarakat Nglanggeran dapat hidup berdampingan dengan perbedaan budaya, agama dan adat kebiasaan masing-masing. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Nglanggeran dengan penduduknya yang terdiri dari berbagai suku dan etnis dapat hidup aman dan damai karena mengedepankan toleransi antar etnis yang ada.

E. Sarana Dan Prasarana

a. Prasarana dan sarana pendidikan

Tersedianya prasarana dan sarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi di manapun menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya prasarana dan sarana pendidikan, mustahil tujuan akan dicapai. Kalurahan Nglanggeran sudah memiliki sarana prasarana pendidikan seperti 3 unit gedung TK, 3 unit gedung tempat bermain anak-anak, 3 unit gedung SD dan Perpustakaan desa/kalurahan sudah memadai. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat sangat memperhatikan pendidikan untuk generasi kedepan sehingga pemerintah mendirikan atau menyiapkan gedung sekolah baik TK,SD,Perpustakaan dan gedung tempat bermain anak-anak.

b. Prasarana dan sarana kesehatan

Tabel 2.6 Sarana Prasarana kesehatan Kalurahan Nglanggeran

No	Prasarana Kesehatan	Gedung/unit
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	6
Jumlah		7

Sumber Data : Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021

Berdasarkan tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa di Kalurahan Nglanggeran sarana prasarana di bidang kesehatan sudah cukup baik. Karena terdapat puskesmas dan posyandu jadi masyarakat Nglanggeran bisa berobat di puskesmas terdekat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sangat memperhatikan sarana-prasarana kesehatan sehingga mempermudah warga desa melakukan kontrol kesehatannya setiap saat.

c. Prasarana peribadatan

Tabel 2.7

Prasarana peribadatan Kalurahan Nglanggeran

No.	Tempat ibadah	Jumlah/unit
1.	Masjid	9
2.	Mushola	9
3.	Gereja khatolik	1
Jumlah		19

(Sumber : Data Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021)

Dari tabel 2.7 diatas, dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana prasarana peribadatan Kalurahan Nglanggeran untuk penduduk yang beragama Islam sudah cukup memadai. Akan tetapi, penduduk yang beragama lain seperti umat khatolik, juga memiliki sarana prasarana peribadatan. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menyiapkan gedung Ibadah bagi umat beragama Islam

dan Katolik dan kedepannya pemerintah setempat juga dapat menyiapkan gedung Ibadah bagi umat beragama Kristen Protestan.

F. Keadaan Ekonomi

Sumber perekonomian masyarakat Kalurahan Nglanggeran ditopang oleh sektor pertanian dan swasta, ada pula peternakan, perikanan dan kerajinan. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Nglanggeran sangat berdampak positif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian.

1. Pertanian dan Tanaman Pangan

Untuk melihat berbagai populasi tanaman yang ada di Kalurahan Nglanggeran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Jenis Produksi Tanaman Pangan

No	Jenis Tanaman	(Ha)	Hasil Panen (Ton)	Bidang
1	Jagung	38,14	4,50	Pertanian
2	Kacang Kedelai	2,50	1,20	Pertanian
3	Umbi-Umbian Lain	54,13	1,40	Pertanian
4	Kacang Tanah	16,26	0,50	Pertanian
5	Padi Sawah	85,92	4,25	Pertanian

Sumber Data : Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021

Berdasarkan tabel 2.8 diatas, dapat dilihat bahwa lahan diperuntukan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan cukup besar. Terutama dalam usaha tanaman jagung, kacang kedelai, umbi-umbian, padi sawah dan juga tanaman buah-buahan mangga, rambutan, durian, sawo, pisang, kelengkeng, sirsak, kedondong, melinjo. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Nglanggeran terdapat banyak hasil tanaman pertanian yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

1. Tanaman Buah.

Tabel 2.9 Tanaman Buah

No	Jenis Tanaman Buah	(Ha)	Hasil Panen (Ton)	Bidang
1	Mangga	1,33	10,90	Pertanian
2	Rambutan	15,70	0,35	Pertanian
3	Durian	70,00	20,00	Pertanian
4	Sawo	0,15	0,15	Pertanian
5	Pisang	24,63	0,00	Pertanian
6	Kelengkeng	1,20	0,12	Pertanian
7	Sirsak	0,26	0,26	Pertanian
8	Kedondong	0,07	0,01	Pertanian
9	Melinjo	2,54	0,25	Pertanian
10	Nenas	0,07	0,01	Pertanian

Sumber Data : Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021

Berdasarkan tabel 2.9 diatas, dapat dilihat bahwa lahan diperuntukan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan cukup besar. Terutama dalam usaha tanaman jagung, kacang kedelai, umbi-umbian, kacang tanah, padi sawah dan juga tanaman buah-buahan mangga, rambutan, durian, sawo, pisang, kelengkeng, sirsak, kedondong, melinjo, nenas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanah perkebunan yang dimiliki oleh warga atau setiap keluarga dimanfaatkan secara produktif untuk dapat menunjang ekonomi masyarakat dan dengan kondisi geografis dan iklim yang baik dapat meningkatkan hasil produktifitas pertanian dan perkebunan. Penghasilan dari tanaman pangan dan buah-buahan menjadi penghasilan yang sangat besar didalam bidang pertanian.

2. Peternakan

Jenis peternakan yang ada di Kalurahan Nglanggeran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Jenis Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah/Pemilik	Jumlah Ternak
1	Sapi	418	521
2	Angsa	4	66
3	Ayam Kampung	732	7830
4	Jenis Ayam Broiler	16	238500
5	Bebek	3	42
6	Kambing	495	905

Sumber Data : Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021

Populasi ternak pada tabel 2.10 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah ternak paling dominan adalah jenis ayam broiler, terus disusul ayam kampung, kambing, sapi angsa, bebek. Dengan jenis peternakan yang banyak menunjukkan bahwa Kalurahan Nglanggeran merupakan Kalurahan peternakan. Dengan jumlah ternak sapi yang cukup banyak dapat kembangkan sehingga dari sapi-sapi tersebut dapat dimanfaatkan untuk produksi susu sapi, ini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat Kalurahan Nglanggeran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat setempat mengembangkan dan menekuni bidang peternakan selain bidang pertanian dan perkebunan untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

3. Jumlah penduduk Kalurahan Nglanggeran berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 2.11 Data penduduk berdasarkan Jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)			
		LakiLaki	%	Perempuan	%
1	Petani	364	41,2	432	77,4
2	Buruh Migran	10	1,13	7	1,25
3	Pegawai Negeri Sipil	11	1,24	9	1,61
4	Peternak	341	38,6	12	2,15
5	POLRI	0	0	2	0,35
6	Karyawan Perusahaan Swasta	155	17,5	93	16,6
7	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	1	0,11	0	0
	Jumlah	882	100	558	100

Sumber Data: Profil Kalurahan Nglanggeran, 2021

Berdasarkan tabel 2.11 diatas, bahwa penduduk Kalurahan Nglanggeran mayoritas bermata pencaharian disektor pertanian atau bekerja sebagai petani diantaranya perempuan sebanyak (77,4%) dibandingkan dengan laki-laki (41,2%) sedangkan disektor peternak laki-laki (38,6%) dibandingkan perempuan (2,15%). Sedangkan, sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kalurahan Nglanggeran sebagai karyawan swasta, pegawai negeri sipil, peternak dan buruh migran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian/jenis pekerjaan masyarakat di Kalurahan Nglanggeran tidak hanya petani atau peternak saja tetapi beraneka ragam yaitu ada yang PNS,POLRI,wira swasta,dan buruh migran.

G. Kondisi Lembaga Pemerintahan

1. Pengertian Umum

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Kepela Desa adalah sebagai pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dan berwenang untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dibantu oleh pembantunya yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang wakilnya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selain itu, Lurah sebagai penanggung jawab dibidang pemerintahan, keuangan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengembang tumbuhkan jiwa kegotong royongan dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan desa.

Wilayah Kalurahan Nglanggeran terdiri dari 5 (lima) Dusun/Pedukuhan yakni Dusun Karang Sari, Dusun Doga, Dusun Nglanggeran Kulon, Dusun Nglanggeran Wetan, Dusun Gunungbutak.

1. Kepala Desa/Lurah

1. Tugas: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan, kemasyarakatan desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Fungsi :menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - a. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - b. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- c. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- d. Menjagahubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa/Kelurahan

- 1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Fungsi :

- a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

- 1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa,

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

2. Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

4. Kepala Urusan keuangan

- a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- b. Fungsi :
Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

2. Fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti seperti naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan desa.
- b. Pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian, aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Pelayanan data, informasi, dan humasan
- d. Pencatatan dan pengeloan barang habis pakai, barang inventaris, dan kendaraan dinas
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas

- f. Pemeliharaan kantor dan sarana prasarana pemerintah desa
 - g. Pelayanan akomodasi, konsumsi, materi, dan kelengkapan rapat
 - h. Pengelolaan data, dokumen, dan/atau administrasi kependudukan desa
 - i. Pelayanan administrasi dan pencatatan kependudukan desa; dan
 - j. Pelayanan legalisasi administrasi kependudukan desa.
7. Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat : Ada – Aktif
8. Kepala Urusan pembangunan : Ada – Aktif
9. Kepala Urusan : Tidak Ada
10. Kepala Urusan : Tidak Ada
11. Dusun/pedukuhan : 5 (Aktif)
- a. Tugas :
 - 1. Membantu Lurah Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Lurah Desa;
 - 2. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - 3. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa; dan
 - 4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah
 - b. Fungsi :
 - 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

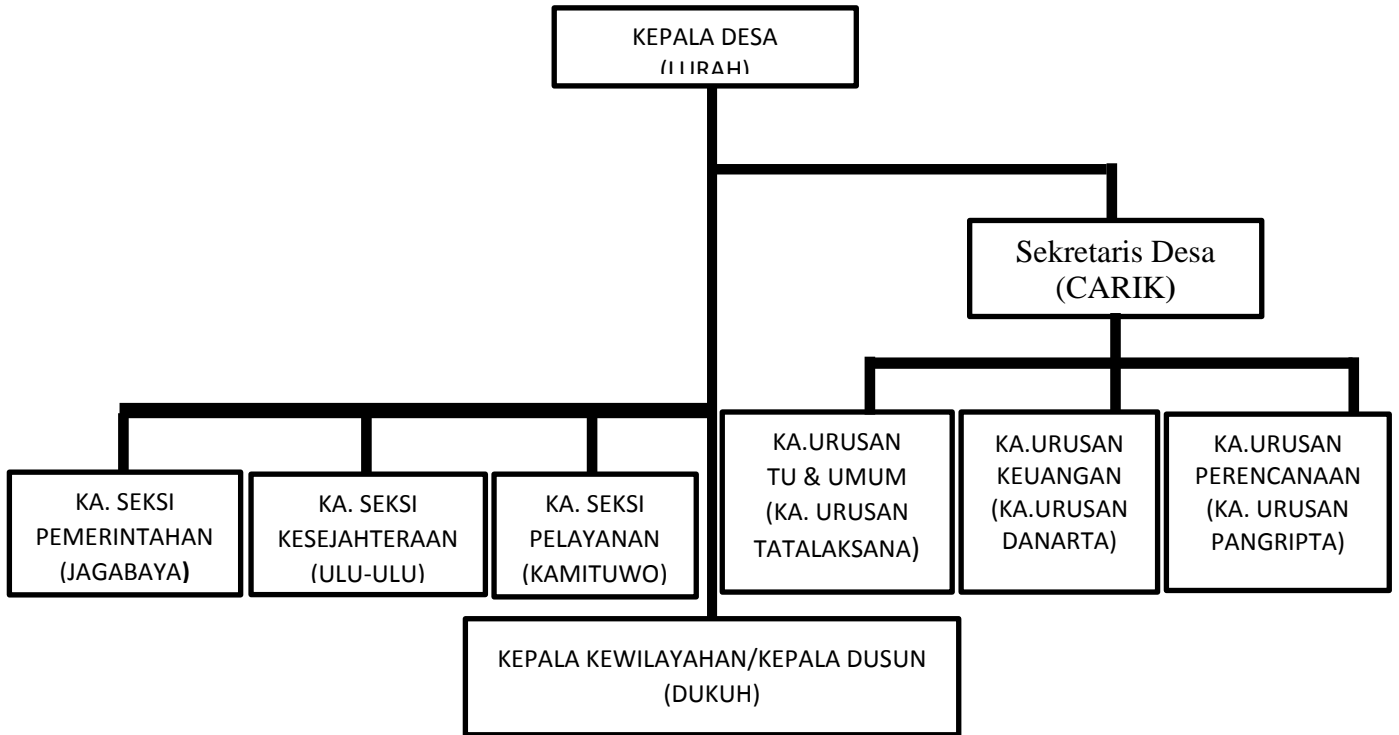
Kondisi pemerintahan desa nglanggeran diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah mempunyai pembagian tugas dan fungsi sesuai kebutuhan pemerintahan desa dan undang-undang. Pemerintah desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Struktur Pemerintahan Kalurahan

Kalurahan Nglanggeran dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh beberapa pamong desa yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Secara umum kondisi struktur pemerintah Kalurahan Nglanggeran dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Nglanggeran Kapanewon
Patuk Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta**



Sumber: Profil Kalurahan Nglanggeran.

H. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “TUNAS MANDIRI”

BUM Desa Tunas Mandiri berdiri pada tanggal 11 oktober 2011 di Kalurahan Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan landasan hukum peraturan desa nomor 07/KPTS/NGL/2011, melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh camat, kades, dan tokoh-tokoh masyarakat di balai Kalurahan Nglanggeran. Secara lebih lanjut, pendirian atau pembentukan BUM Desa Tunas Mandiri ini didasarkan adanya kebutuhan dan potensi desa yang mana harus dikelola secara baik dan benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 213 ayat (1) “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuh dan potensi desa” PP No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 samapi 81.

a. Susunan Kepengurusan BUM Desa Tunas Mandiri

Susunan kepengurusan BUM Desa Tunas Mandiri periode masa jabatan 2016-2021 diatur melalui SK. Kepala desa nomor 20/KPTS/2016 tanggal 22 juli 2016. Untuk susunan pengurusan BUM Desa Tunas Mandri dapat dilihat sebagai berikut:

Pembina	:	Kepala Desa Nglanggeran
Pengawas	:	Ketua : Ponijo
	:	Sekretaris : Supratmiyati
	:	Anggota : Agus
	:	: Lilik Suharyanto
	:	: Sudiyono
Pelaksana Operational	:	Direktur : Ahmad Nasrudin
	:	Sekretaris : Sugeng Handoko

	: Bendahara	: Heru Purwanto
Kepala Unit Usaha Wisata		: Aris Budiman
Kepala Unit Usaha UED SP		: Arleta Intan Maydaeswari
Kepala Unit Usaha Grosir		: Wantirah
Kepala Unit Usaha Tps		: Supardi

b. Visi Dan Misi BUM Desa Tunas Mandiri

Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Nglanggeran dengan pengembangan usaha ekonomi dan potensi desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri.

Misi

1. Mengembangkan potensi ekonomi dan asset Desa Nglanggeran
2. Pembangunan dan peningkatan layanan sosial dan layanan dasar kepada masyarakat, diprioritaskan dalam penanggulangan kemiskinan
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan umum dan perekonomian Desa Nglanggeran
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak

c. Potensi Ekonomi Perdesaan

1. Penghasil produk organik

Yang satu ini mulai menjadi tren bagi masyarakat kota yakni produk organik. Produk organik mulai diperhatikan karena kepedulian masyarakat terhadap kesehatannya. Tanaman yang menghasilkan produk organik ini disebut sebagai tanaman organik

yang mana dalam proses penanamannya tidak menggunakan bahan-bahan kimia buatan yang bisa dikembangkan sebagai salah satu potensi desa.

Produk organik ini bisa berupa produk olahan, sayuran organik. Kelebihan pada kesehatan inilah yang membuat harga jual dari produk tanaman organik ini lebih mahal dari tanaman lain yang tidak melalui system penanaman organik atau yang sering disebut sebagai produk non organik.

Selain produk olahan, tanaman organik ada juga produk peternakan organik yang juga dilirik oleh masyarakat kota yang mana juga memiliki manfaat yang serupa seperti produk tanaman organik. Produk peternakan organik ini juga bisa dikembangkan nilai jual dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Produk kesenian

Produk kesenian juga dapat ditingkatkan sebagai potensi desa adalah produk kebudayaan berupa penampilan yang mana bisa dikaitkan dengan potensi yang ketiga yang bisa ditingkatkan di Desa yakni adalah potensi wisata.

3. Potensi wisata

Apabila potensi Desa yang ketiga ini dapat ditingkatkan, maka potensi pertama dan juga potensi yang kedua diatas juga dapat diangkat untuk mendatangkan konsumen pada Desa. Salah satu contohnya adalah Desa Nglanggeran yang mampu

mendatangkan tamu turis sehingga berbagai produk pertanian serta produk keseniannya mampu dicapai oleh masyarakat nasional.

Potensi Desa berupa potensi wisata juga menjadi potensi jangka panjang yang mana dalam pengembangannya harus sangat berhati-hati sehingga tidak merusak potensi yang ada. Tanpa adanya campur tangan pemerintah dan kesadaran masyarakat Desa, potensi Desa wisat ini akan mati dan tidak dapat dikembangkan.

Dengan meningkatkan ketiga potensi Desa diatas, diharapkan Desa juga tidak kalah dalam persaingan dalam pergerakan didunia modern. Bahkan dengan kearifan lokal yang berada didalamnya, desa tidak perlu menyesuaikan dengan kebutuhan global namun bagai nama dunia atau dunia global mampu melihat masyarakat desa sebagai salah satu keunikan yang harus tetap dijaga kelestariannya. Dengan potensi desa yang mampu dikenali, mampu untuk dilakukan manajemen didalamnya serta mampu diajak untuk berpartisipasi didalamnya, maka keberadaan desa mampu terus dijaga dan juga mencegah terjadinya urbanisasi yang memaksa warga desa untuk pergi kekota. Desa haru menjadi tempat yang nyaman juga sebagai bentuk investasi di masa depan yang tidak boleh dilewatkan.

d. Jenis Kegiatan Usaha BUM Desa Tunas Mandiri

1. Unit usaha wisata

Unti usaha wisata BUM Desa Tunas Mandiri memiliki produk utama yaitu: jasa pemanduan wisata, BUM Desa Tunas Mandiri

mempunyai pemandu wisata yang siap mengantarkan wisatawan domestik maupun mancanegara untuk keliling menikmati pemandangan alam yang ditawarkan oleh Desa wisata ini. Ada empat tempat wisata utama yang sudah cukup dikenal oleh berbagai pelancong baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Empat tempat wisata tersebut adalah: Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, Air Terjun Kedung Kandang dan Kampung Pitu.

2. Unit usaha grosir

Unit usaha grosir “Toko Rizki Barokah” mempunyai produk utama yaitu penyediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Secara lebih lanjut, untuk pemasaran barang-barang kebutuhan pokok tersebut dilakukan melalui salesman yang nantinya akan mendistribusikan kewarung-warung warga sekitar wilayah Desa Nglanggeran dengan harga tentu cukup menarik. Keuntungan yang didapatkan unit ini berkisar kurang lebih 10 juta per tahun.

3. Unit usaha simpan pinjam atau UED SP

Unit usaha simpan pinjam atau usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED SP) memiliki produk utama yaitu jasa pelayanan simpan pinjam bagi para anggotanya. Saat ini UED SP mempunyai jumlah anggota sebanyak 124 orang yang berasal dari beberapa pendudukan di Desa Nglanggeran yaitu pedukuhan dogo, pedukuhan karang sari, pedukuhan butak, pedukuhan Nglanggeran kulon, pedukuhan Nglanggeran wetan. Suku bunga yang

ditawarkan pada unit usaha UED SP ini terbilang relatif cukup rendah, untuk suku bunga tabungan per tahun sebesar 0,05 persen. Sementara disisi lain, suku bunga pinjam sebesar 1,5 persen per bulan.

4. Unit usaha pengelolaan sampah atau TPS KSM Barokah 3R

Unit usaha pengelolaan sampah atau TPS KSM Barokah 3R beradah di daerah pedukuhan gunung butak RT.20, RW.5 jasa yang ditawarkan oleh unit usaha adalah jasa pengangkutan serta pengelolaan sampah baik organik dan non organik yang diperuntukan secara khusus bagi masyarakat disekitar wilayah Desa wisata Nglanggeran. Saat ini TPS KSM Barokah 3R mempunyai 3 anggota yang bertugas untuk mengangkut serta mengelola sampah. Sampah-sampah yang berasal dari rumah warga atau tempat usaha disekitar wilayah Desa Nglanggeran kemudian dikelola sedemikian rupa menjadi pupuk kompos yang tentunya bermanfaat dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Keuntungan atau pendapatan dari unit usaha pengelolaan sampah BUMDes Tunas Mandiri.

e. Kegiatan Usaha Dalam Tahap Pengembangan

1. Nama unit usaha

Wisata air terjun musiman kedung kandang

Usaha kecil menengah (UKM)

Pengembangan rest area dan pusat parker

2. Produk/kegiatan

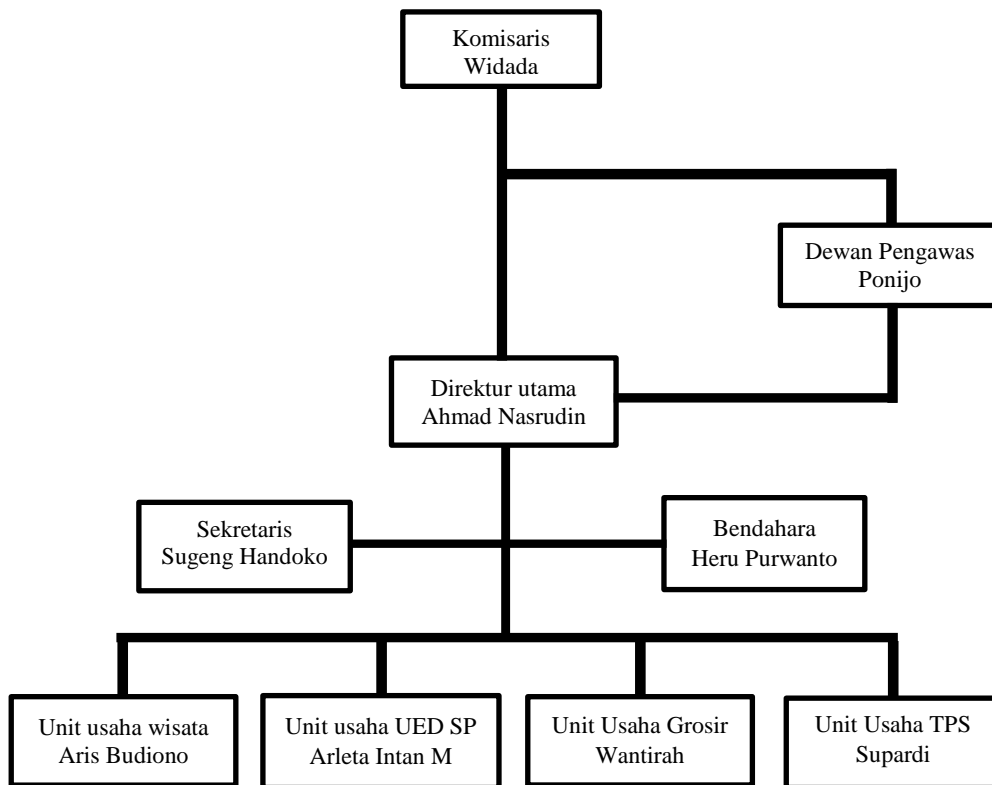
Pembuatan joglo dan warung kopi pengunjung

Pembuat kerupuk dari bongol pisang dan kulit pisang

Pembuatan riset area dan pusat parkir di jalan pasca pembangunan jalan nasional talang-ngalang.

Gambar

Struktur Organisasi BUM Desa Tunas Mandiri



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Perencanaan dalam pengelolaan BUM Desa Tunas Mandiri sudah berjalan dengan baik dimana pada awal perencanaan diadakan musyawarah anatar pihak BUM Desa, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat untuk membahas terkait pengelolaan bumdes untuk meningkatkan pendapatan asli, jenis usaha yang akan dijalankan, serta arah dan tujuan didirikannya BUM Desa tunas mandiri. Dengan adanya keterlibatan dari semua pihak yang ada di Kalurahan Nglanggeran dapat menerapkan prinsip transparan dan juga partisipasi dalam mengelola BUM Desa.
- 2) Pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan selama ini terkait potensi-potensi yang dikelola oleh BUM Desa untuk meningkatkan PAD sudah berjalan maksimal sampai saat ini. Dalam hal ini dapat membangun kerja sama yang baik antara Pemerintah Kalurahan, BUM Desa dan masyarakat Kalurahan, sehingga terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis. Dan juga ini menjadi bukti bahwa BUM Desa sangat melibatkan masyarakat Kalurahan dalam pengelolaan badan usaha milik desa itu sendiri.
- 3) Pelaksanaan dalam pengelolaan BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), keterlibatan dari pengurus BUM Desa, pemerintah Kalurahan dan masyarakat sangat peranan penting dalam kemajuan BUM Desa Tunas Mandiri di Kalurahan Nglanggeran agar dapat mengelola potensi-potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Nglanggeran.

- 4) Pengawasan yang dilakukan BUM Desa Tunas Mandiri sudah berjalan dengan baik dimana dalam pelaporan dari BUM Desa terkait dengan perkembangan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa kepada pemerintah Kalurahan dan juga ada laporan keuangan setiap tahun dalam musyawarah Kalurahan yang melibatkan semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas melalui hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain dalam hal Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dalam hal ini BUM Desa harus lebih meningkatkan kinerja dan tanggung jawab maupun SDM pihak Badan Usaha Milik Desa itu sendiri.

1. Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. tersebut. Dengan demikian karenan adanya kerja sama antara pemerintah desa, BUM Desa dan masyarakat desa dapat membuahkan bahwa pengelolaan yang dilakukan memang bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
2. Diharapkan desa ini menjadi contoh kepada desa-desa yang ada di Indonesia bahwa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, untuk selalu melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan BUM Desa.

3. Dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tulisan ini sangat diharapkan agar menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu. Yogyakarta Edisi Pertama.
- Afifiddin 2010. Teori Pengelolaan. Tersedia www.academia.edu 1221 - 3778 teori_pengelolaan diakses 15 Februari 2017
- Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Ernie Tisnawati, Sule Kurniawan Saefullah. 2012, Pengantar Manajemen, Kencana Prenada Media Group
- Handoko, Hani T. 2015. *Manajemen*. Hak terbit BPFE- Yogyakarta
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM PRESS, Malang.
- Nawawi, H. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Notoatmodjo, S. (1992). *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Salim Dan Yenni Salim. 2002. *Tersedia pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html diakses tanggal 18 February 2017*. <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/>
- Soewarno Handayaniingrat. 1997. *Pengertian Pengelolaan. Tersedia pengertian pengelolaan-perencanaan-dan.html diakses tanggal 18 Februari 2017*. <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/>
- Terry, G. R. (2006). Prinsip-prinsip Manajemen, terj. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Mario Wowor, Frans Singkoh, Welly Waworundeng. Vol. 8, No. 4, (Tahun 2019). berjudul:

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso.

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017>

Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto. Vol. 13, No. 1 (2016). yang berjudul:

Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEes).

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>

Afifa Rachmanda Filya. halaman-23-43, (2018) yang berjudul:

Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

Eka Cahyani, Ahmad Guspul, Ratna Wijayanti. Vol. 1, No. 1, Oktober (2019.)

Analisis Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh).

<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/view/873/452>

Edison Ledi Bulang. 13520043, *Pengelolaan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*, Skripsi APMD, 2017.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Miliki Desa.

jbptppolban-gdl-rejarudian-8048-3-bab2-5 pdf

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>